

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terkendalanya proses implementasi pembangunan GPR kota Bukittinggi, maka peneliti berkesimpulan bahwa penyebab terkendalanya proses pembangunan GPR Kota Bukittinggi adalah *pertama*, karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi, dengan kurangnya anggaran yang disediakan pemerintah tiap tahun maka sulit untuk melakukan pembangunan yang membutuhkan biaya besar. Dengan tidak mencukupinya anggaran dari Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, tentu saja untuk melanjutkan pembangunan GPR terkendala. Karena untuk pembangunan GPR yang berjumlah 5 lantai tersebut harus memiliki anggaran yang besar pula.

*Kedua*, karena masalah kontraktor yang kurang kualifite, artinya kontraktor tidak bekerja sesuai kontrak yang telah disepakati bersama dengan Dinas PU baik dalam masalah waktu kerja maupun masalah pendanaan. Sehingga terjadi one prestasi yaitu pemutusan kontrak kerja sepihak dari Dinas PU, karena adanya pemutusan kontrak, Dinas PU kembali mencari kontraktor baru untuk melanjutkan pembangunan GPR, agar proyek yang tertunda dapat dilanjutkan secepatnya.

*Ketiga*, karena masalah status kepemilikan tanah ( lahan ) tempat dibangunnya GPR ini. Pada awalnya tanah tempat pembangunan GPR ini merupakan tanah milik Provinsi Sumatera Barat tepatnya Tanah Kantor Kehutanan dan pihak

Provinsi Sumatera Barat memberikan izin pinjam pakai tanah tersebut, namun pihak Pemerintah Kota Bukittinggi tetap berusaha agar tanah yang berstatus pinjam pakai ini dapat menjadi hak milik Pemerintah Kota Bukittinggi dengan status hibah. Dengan dihibahkannya tanah tempat dibangunnya GPR ini maka pihak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengelola GPR ini dengan lebih bermanfaat dan lebih leluasa.

Dari kendala-kendala yang terjadi selama pembangunan GPR ini, masalah anggaran merupakan masalah yang sangat sensitif, karena pembangunan GPR ini akan terlaksana jika dana yang dianggarkan mencukupi dan sarat muatan politis yang menimbulkan beberapa spekulasi negatif. Tanpa dana yang cukup gedung parkir yang diharapkan tidak akan terwujud secara sempurna. Karena anggaran yang tidak mencukupi ini pembangunan GPR sampai saat ini masih tertunda, karena fasilitas penunjang GPR ini belum lengkap.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terkendalanya proses implementasi pembangunan GPR kota Bukittinggi, maka ada beberapa saran yang perlu peneliti berikan untuk kelanjutan pembangunan GPR ini kedepannya:

1. Harapan kedepannya agar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat menganggarkan dana yang cukup untuk kelanjutan pembangunan GPR ini. Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan dapat membuat permintaan kepada Pemerintah Pusat melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terutama untuk ketersediaan fasilitas penunjang GPR. Fasilitas GPR seperti Lift, CCTV dan Penangkal Petir dan Marka Jalan dapat dilengkapi

melalui dana APBN sehingga gedung parkir ini dapat digunakan secara optimal.

2. Kedepannya Dinas PU agar lebih selektif dalam memilih kontraktor yang memiliki kualifikasi yang sesuai dan memiliki progress kedepan, sehingga pergantian kontraktor tidak terjadi lagi dalam proyek multiyear yang menimbulkan proses pembangunan terkendala dan berhasil seperti yang direncanakan.
3. Kedepannya agar dalam perencanaan pembangunan, pemerintah terlebih dahulu memikirkan ketersediaan lahan. Dalam hal ini masalah status kepemilikan tanah tempat bangunan akan dilaksanakan, agar tidak terjadi sengketa tanah atau pembangunan mengalami kendala yang fatal.

